



# Angka Kemiskinan di Kota Yogya Melonjak

## ■ Pemkot Yogya Sebut Kenaikan Sebagai Dampak Pandemi

**YOGYA, TRIBUN** - Kalangan legislatif menyoroti meningkatnya angka kemiskinan di Kota Yogyakarta sepanjang 2021. Berdasarkan data statistik, angka kemiskinan berada di angka 7,21 persen pada 2020 lalu dan melonjak hingga 7,69 persen pada 2021.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Yogyakarta menyoroti meningkatnya angka tersebut. Sorotan tajam itu disampaikan di sela rapat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021, Jumat (24/6) sore.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta, Indaruwanto Eko Cahyono, mengungkapkan, berdasarkan data statistik, angka kemiskinan yang berada di angka 7,21 persen pada 2020 lalu, melonjak hingga 7,69 persen pada 2021. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi perhatian serius eksekutif.

"Maka, penguatan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) dalam upaya pengentasan kemiskinan menjadi sangat penting dan wajib dilaksanakan," ujarnya.

Ia menuturkan, fakta di lapangan pun jelas menunjukkan, bahwa dewasa ini masih banyak kalangan masyarakat, yang mengajukan Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk keperluan pendidikan. Fenomena itu, tentu bisa dijadikan salah satu tolok ukur, soal menganganya jurang kemiskinan.

"Untuk itulah, selain menghitung pandemi Covid-19 sebagai salah satu bagian penentuan KMS, penilaian harus obyektif dan lebih selektif agar tepat sasaran," ucap Ndaru.

Tidak berhenti sampai di

**GENJOT PEMULIHAN**

- Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta sepanjang 2021 alami kenaikan.
- Angka kemiskinan berada di angka 7,21 persen pada 2020, melonjak hingga 7,69 persen 2021.
- Dewan mendesak penguatan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan).
- Pemkot Yogya menyebut hal tersebut sebagai dampak pandemi Covid-19.

situ, Fraksi PAN juga memberikan sorotan tajam kepada jajaran eksekutif, mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2021 yang cenderung mencolok, hingga Rp329 miliar. Sehingga, skema, serta proses perencanaannya, mengundang tanda tanya.

"Terus terang, ini jadi pertanyaan kami, sekaligus dorongan bagaimana supaya perencanaan penganggaran itu bisa lebih matang dan profesional, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta," ulasnya.

Menanggapi hal itu, eksekutif berdalih, kondisi pandemi Covid-19 yang naik turun, sepanjang 2021 membuat pemulihan ekonomi urung berjalan optimal. Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, menandatangani, peningkatan angka kemiskinan sekitar 0,48 persen tersebut, sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pandemi virus corona yang grafiknya tak menentu selama 2021. Ia tak menampik, pukulan telak memang dirasakan warga masyarakatnya.

"Saya kira masih ada relevansinya (dengan pandemi). Masih naik turun (kasus) kemarin. Saya menduganya itu. Bukan mencari pembenaran, karena ini nyata," katanya, usai rapat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021, Jumat (24/6) sore.

**Melangkah**

Sumadi berjanji, di tengah tren pelandatan sebaran virus corona dalam kurun waktu satu bulan terakhir, pihaknya pun bakal menggenjot langkah pemulihan ekonomi. Khususnya, dengan menasar deretan pihak yang paling terdampak, seperti para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

"Kami akan lakukan penguatan bagi warga yang terkena dampak pandemi, di sektor ekonomi. Pelaku UKM ini sangat dominan untuk kita tingkatkan. Semoga tren pertumbuhan Covid-19 di Kota Yogya bisa terus melandai," ujarnya.

Sumadi juga menandatangani, situasi pandemi membuat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2021 lalu, menjadi cukup besar, hingga Rp329 miliar. Dia mengatakan, banyak kegiatan yang sejatinya sudah direncanakan, akhirnya dibatalkan karena terkendala protokol kesehatan (prokes) virus corona.

"Ya, kemarin kan pandemi banyak kegiatan yang tidak terealisasi. Jadi, semua sektor kena, sehingga anggaran tidak terserap. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, itu tidak bisa dilakukan," urainya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			
3. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM			

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005